

RINGKASAN

**SARI RAMADHANA
NIM : 220510083**

**PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DI HUKUM DENGAN PASAL
PEMBUNUHAN BIASA (Kajian Putusan
Hakim No.149/Pid.B/2020/PN Pbm)**

**Sumiadi S.H., M.Hum Dan Nabhani Yustisi,
S.H., M.H.**

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa yang mendapat perhatian serius dalam hukum pidana Indonesia karena berkaitan dengan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia. Dalam KUHP, pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP (Pasal 458 ayat (1) KUHP baru), sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang dibedakan oleh adanya unsur "dengan rencana terlebih dahulu". Perbedaan penafsiran terhadap unsur tersebut masih sering terjadi dalam praktik peradilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm, di mana terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Pasal 338 KUHP terhadap fakta persidangan serta mengkaji bagaimana seharusnya putusan tersebut diperbaiki apabila unsur-unsur Pasal 340 KUHP sebenarnya telah terpenuhi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 338 KUHP dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pbm belum sepenuhnya sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan analisis alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan Visum et Repertum, terdapat rangkaian perbuatan yang mengindikasikan unsur dengan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), sehingga perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa eksaminasi putusan merupakan mekanisme yang paling relevan untuk mengevaluasi ketepatan penerapan hukum dalam putusan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa hakim perlu lebih cermat dalam menilai kesesuaian fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana, khususnya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, terhadap putusan yang masih menimbulkan perbedaan penafsiran, eksaminasi putusan perlu dijadikan sarana evaluasi ilmiah guna mendorong konsistensi penerapan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Pembunuhan Biasa, Pertimbangan Hakim, Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP.

SUMMARY

SARI RAMADHANA
NIM : 220510083

**“Criminal Act of Rape Committed by a Minor
Against a Child (Study of Meureudu Sharia
Court Decision No. 1/Jn-Anak/2024/MS.Mrd)”**

**Sumiadi S.H., M.Hum Dan Nabhani Yustisi,
S.H., M.H.**

The crime of murder is an offense against human life that receives serious attention in Indonesian criminal law, as it concerns the protection of the right to life as a fundamental human right. Under the Criminal Code (KUHP), ordinary murder is governed by Article 338 (Article 458 paragraph (1) of the new Criminal Code), whereas premeditated murder is governed by Article 340, distinguished by the element of acting "with premeditation." Divergent interpretations regarding these elements frequently occur in judicial practice, as evidenced by Judgment Number 149/Pid.B/2020/PN Pbm, in which the defendant was sentenced under Article 338. Therefore, this study aims to analyze the appropriateness of applying Article 338 in light of the case facts and to examine how the judgment should be rectified if the elements of Article 340 were indeed satisfied..

The research employs a normative-juridical method utilizing statutory, case, and contextual approaches. Specifically, it applies a normative legal research methodology incorporating both statutory and case-based approaches. The legal materials utilized comprising primary, secondary, and tertiary sources were gathered through a literature review and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.

The research findings indicate that the application of Article 338 of the Criminal Code in Judgment Number 149/Pid.B/2020/PN Pbm did not fully align with the established facts of the case. Based on an analysis of the evidence including witness testimonies, the defendant's statement, and the Visum et Repertum (forensic medical report) there was a sequence of actions indicating premeditation (voorbedachte raad); consequently, the act should more accurately have been classified as premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code. The study further demonstrates that the judicial review of the verdict serves as the most relevant mechanism for ensuring the proper and consistent application of the law in the ruling.

Based on the research findings, the author argues that judges need to exercise greater care in assessing whether the facts of an agreement align with the elements of a criminal offense specifically the element of "premeditation" (with prior planning) under Article 340 of the Criminal Code. Furthermore, regarding rulings that give rise to divergent interpretations, the examination of solutions should serve as a means of scholarly evaluation to foster consistency in the application of criminal law in Indonesia.

Keywords: Premeditated Murder, Ordinary Murder, Judicial Reasoning, Article 338 of the Indonesian Criminal Code, Article 340 of the Indonesian Criminal Code.